



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru, Telp. : (0761) 33815 Fax : (0761) 863646
Email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id, Izin Mendiknas : 226/D/0/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id,

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :02/STIKes-HTP/II/2022/0250.A

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Ricardo, SE, M.Ak, AAP
: Wen Via Trisna, SKM, MKM
: Fitriani Astika, SKM, MKM
Jabatan : Dosen STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang “**BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RSD MADANI KOTA PEKANBARU**” yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 01 Maret s/d 30 April 2022

Tempat : RSD Madani

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes
No.Reg. 10306114265

**BIDANG ILMU: REKAM MEDIS
DAN INFORMASI KESEHATAN**

LAPORAN PENGABDIAN KE MASYARAKAT



**BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RSD MADANI
KOTA PEKANBARU**

**Tim
Pengusul**

**RICARDO, SE, M. Ak, AAP / NIDN 1008098502
WEN VIA TRISNA, A.Md PK, S.KM, M.KM/ NIDN 1023108605
Fitriani Astika, SKM, M.K.M / NIDN 1012118803**

**PROGRAM STUDI REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul : **Bimbingan Teknis Dan Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD
Madani Kota Pekanbaru**
2. Bidang Keilmuan : Rekam Medis
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama : Ricardo, SE, M.Ak, AAP
- b. NIDN : 1008098502
- c. Pangkat/golongan : IIIb
- d. Jabatan Fungsional/struktural : Asisten Ahli
- e. Sedang Melakukan Pengabdian : Ya/ Tidak
- f. Program Studi : D III Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan
- g. Bidang Keahlian : Rekam Medis
- h. Alamat kantor/ Telp/Fax/email : Jl. Mustafa Sari No. 05
- i. Alamat rumah/ Telp/Fax/email : Jl. Purwodadi Ujung Perum Graha Purwodadi
Blok E1/081374488806/ricardo@htp.ac.id
4. Jumlah Anggota (Mak. 3 orang) : 1 orang
- a. Nama Anggota I : Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
- b. Nama Anggota II : Fitriani Astika, SKM, M.KM
5. Jangka Waktu Kegiatan : 6 Bulan
6. Bentuk Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Lokasi Kegiatan : RSD Madani Kota Pekanbaru
8. Biaya Penelitian
- a. Sumberdari DIPA STIKes : Rp.4.000.000
- b. Sumber Lain : Rp. –

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kesehatan



(Ns. Abdurrahman, Harid, M.Kep, Sp.Kep.Kom)

No.Reg. 10306112203

Pekanbaru, 16 Juni 2022
Ketua Pelaksana,

(Ricardo, SE, M.Ak, AAP)
NIDN 1008098502

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Hang Tuah Pekanbaru



(Agus Alamsyah, SKM, M.Kes)
No.Reg. 10306113204

RINGKASAN

Menurut SAP Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 9 bahwa, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan

Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang memiliki letak strategis di pinggir jalan raya Garuda Sakti Km 2. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan RSD Madani resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2020. Sebagai BLUD, RSD Madani dalam menyusun laporan keuangan juga berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 dan juga mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 tahun 2018. Untuk membantu kelancaran penerapan SAP yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018, RSD Madani Kota Pekanbaru perlu melakukan persiapan. Sehingga diharapkan setelah penerapan SAP dapat berjalan dengan baik kualitas laporan keuangan RSD dapat meningkat, dan informasi laporan keuangan RSD Madani dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya setelah dilakukan konfirmasi dan survei awal melalui wawancara kepada Staf keuangan, bendahara dan Kepala Sub Bagian Keuangan RS Madani, sebagai entitas akuntansi yang baru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu rasanya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.	i
RINGKASAN.	ii
DAFTAR ISI.	iii
DAFTAR TABEL.	iv
DAFTAR LAMPIRAN.	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Kegiatan	7
D. Manfaat Pengabdian masyarakat	7
E. Luaran Pengabdian.....	8
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	10
A. Persiapan bimbingan teknis dan pendampingan	10
B. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan	11
C. Lokasi Kegiatan	11
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	12
A. Hasil	12
B. Pembahasan	13
C. Luaran dan Target Capaian.....	14
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	16
D. Biaya Kegiatan.....	10
E. Jadwal Pengabdian	10
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran	17

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1: Luaran dan Target Capaian.....	9
Tabel 5.1: Anggaran Biaya.....	9
Tabel 5.2: Jadwal Pengabdian.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti
Lampiran 2	Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
Lampiran 3	Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 4	Surat Pernyataan Ketua Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kewajiban setiap tahun yang harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/ Kota.

Menurut SAP Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 9 bahwa, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Laporan Keuangan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini dilakukan dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan PPKD (Efrianti, 2014). Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan negara, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS). Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Basis Kas menjadi akrual juga mendorong para pihak yang

bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengikuti peraturan yang baru yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh terhadap peningkatan karakteristik kualitatif dalam perubahan standar akuntansi pemerintah yang baru.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 Komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

(a) Relevan;

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

(b) Andal;

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan

(c) Dapat dibandingkan;

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila

entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

(d) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam Pasal 189 ayat 3 PP 12 Tahun 2019 Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pasal 191 ayat 2 menyatakan Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. PP No 12 tahun 2019 juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus bisa tepat waktu untuk menghasilkan laporan keuangan, yaitu minimal per tanggal 31 Maret harus telah bisa menyelesaikan laporan keuangan unaudited dan menyerahkan ke BPK untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Rumah sakit merupakan institusi publik yang berperan penting dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat suatu negara. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, selalu melakukan pengembangan, mandiri dalam pengelolaannya serta memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk

mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar.

Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang memiliki letak strategis di pinggir jalan raya Garuda Sakti Km 2. RSD Madani Kota Pekanbaru dibangun sejak Tahun 2014 dengan area seluas 30.400 m² dan luas bangunan 13.128,51 m². Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru telah diresmikan pada tanggal 26 Januari 2018 oleh Bapak Walikota Pekanbaru. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit kelas c dan telah memiliki izin operasional yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2017 dengan nomor surat izin 4/05.12/DPMPTSP/XII/2017.

Rumah Sakit Daerah Kota Pekanbaru ini merupakan bagian dari jejaringan pelayanan kesehatan untuk mencapai indikator kinerja kesehatan yang ditetapkan oleh daerah. Oleh karenanya RSD Madani Kota Pekanbaru mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit.

Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medis secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan juga oleh Dinas Kesehatan propinsi dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Tahun 2019 merupakan tahun kedua rumah sakit ini beroperasi, dimana terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemenuhan fasilitas peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit. RSD Madani terus berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar dan modern sehingga banyak masyarakat yang nantinya dapat merasakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai standar.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan RSD Madani resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2020. Sebagai BLUD, RSD Madani dalam menyusun laporan keuangan juga berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 dan juga mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 tahun 2018. Untuk membantu kelancaran penerapan SAP yang diatur dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018, RSD Madani Kota

Pekanbaru perlu melakukan persiapan. Sehingga diharapkan setelah penerapan SAP dapat berjalan dengan baik kualitas laporan keuangan RSD dapat meningkat, dan informasi laporan keuangan RSD Madani dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya setelah dilakukan konfirmasi dan survei awal melalui wawancara kepada Staf keuangan, bendahara dan Kepala Sub Bagian Keuangan RS Madani, sebagai entitas akuntansi yang baru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu rasanya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Melihat permasalahan ini maka penulis tertarik melakukan penelitian/ pengabdian ke masyarakat dengan judul **“Bimbingan Teknis dan Pendampingan Laporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Madani Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Melihat Kondisi yang ada di Rumah Sakit Daerah Madani perlu diadakan upaya untuk mengoptimalkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menyusun Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 RSD Madani Kota Pekanbaru.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk percepatan penyampaian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSD Madani Kota Pekanbaru sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memberikan pemahaman kepada staf bagian keuangan RSD Madani Kota Pekanbaru dalam Menyusun laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

D. Manfaat Pengabdian Masyarakat

1. Bagi Staf bagian Keuangan di RSD Madani Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan Laporan keuangan Badan Layanana Umum Daerah (BLUD)
2. Dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan BLUD khususnya RSD Madani Kota Pekanbaru
3. Bagi Institusi STIKes Hang Tuah Pekanbaru sebagai sarana promosi dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pengabdian masyarakat.

E. Luaran Pengabdian

Hasil dari Pengabdian Masyarakat juga akan Publikasi ke jurnal pengabdian masyarakat.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra adalah bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSD Madani Kota pekanbaru. Bimbingan teknis tersebut meliputi pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 1 hari. Bimbingan ini pada prinsipnya membekali dan mendampingi staf dan karyawan bagian keuangan di RSD Madani yang terdiri dari pejabat Penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan , pembantu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran. Setelah para peserta mengikuti bimbingan teknis diharapkan dapat memahami dalam menyusun laporan keuangan.

Model bimbingan teknis ini menggunakan model pendampingan fasilitatif. Model pendampingan fasilitatif diajukan dengan asumsi bahwa staf/ karyawan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan mengenal dan memahami konsep laporan keuangan pada badan layanan umum daerah. Dengan demikian efektivitas kegiatan ditunjukkan oleh kemampuan peserta dalam: (1) Memahami konsep teoritis tentang laporan keuangan. (2) Meahami standar akuntansi pemerintahan (3) Memahami kebijakan akuntansi (4) Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang disiapkan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Persiapan Bimbingan Teknis dan Pendampingan

- Pengabdian kepada masyarakat diawali dengan mengurus permohonan izin dari STIKes Hang Tuah Pekanbaru Setelah mendapatkan izin, surat izin diteruskan ke Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru.
- Melakukan pengumpulan data, melakukan perumusan, menentukan prioritas penyelesaian, menyusun kerangka penyelesaian masalah berdasarkan masalah yang dipilih.
- Menentukan jumlah staf dan karyawan bagian keuangan RSD madani yang ikut dalam pengabdian kepada masyarakat
- Menentukan jadwal pengabdian kepada masyarakat
- Mempersiapkan materi penyuluhan tentang laporan Keuangan BLUD
- Mempersiapkan kelengkapan peralatan penyuluhan seperti alat tulis, laptop, infokus, *soundsystem*, ruangan.
- Menjelaskan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat kepada bagian keuangan RSD Madani Kota Pekanbaru

B. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dengan pemberian penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) di RSD Madani Kota Pekanbaru. Sebelum diberikan penyuluhan terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang laporan Keuangan. Melakukan evaluasi yang terdiri dari keberhasilan dalam bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum daerah. Selanjutnya menyiapkan materi bimbingan teknis yaitu:

- Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan realisasi anggaran
- Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan operasional
- Bimbingan teknis Penyusunan laporan posisi keuangan (Neraca)

- Bimbingan teknis Penyusunan Laporan Ekuitas (LPE)
- Bimbingan teknis Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

C. Lokasi Kegiatan

Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan ini di Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil

Pada Pasal 99 ayat 3, Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang BLUD BLUD wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan SAL, Neraca, laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sehingga laporan keuangan BLUD dan pemerintah adalah sama. Pada SAP sendiri pemerintahan wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Dari hasil penelitian saat ini di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru Menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, permendagri no 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), PSAP No 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.

RSD Madani Menggunakan basis akruwal dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sejak tahun 2019. Basis akruwal digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas. Dalam Menyusun laporan keuangan RSD Madani disusun oleh Kepala

Sub bagian keuangan dan dibantu oleh staf keuangan yang berlatar belakang akuntansi, komputer dan tenaga kesehatan lainnya.

4.2 Pembahasan

Bagian ini mengemukakan gambaran umum lokasi dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021 RSD Madani Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode forum group diskusi (FGD) dan pendampingan secara langsung dalam menyusun laporan keuangan RSD Madani Kota Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam rangka membantu bagian keuangan RSD madani Kota pekanbaru dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan badan layanan umum daerah (BLUD). Dalam sesi FGD adalah dilakukan diskusi tentang pengenalan akuntansi secara mendalam dan pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundangan. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengumpulkan sumber data keuangan sesuai dengan dokumen yang di anggap sah dalam transaksi keuangan. Mulai dari menyusun laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, dana bersumber dari BLUD dan APBD. Menyusun neraca keuangan, laporan operasional rumah sakit dan laporan ekuitas rumah sakit.

Materi bimbingan teknis adalah peraturan perundangan yang berhubungan dengan standar penyusunan laporan keuangan, sistem akuntansi BLUD rumah sakit. Pendampingan dalam menyusun laporan keuangan BLUD RSD Madani Kota Pekanbaru dilakukan selama satu minggu. Dilakukan tidak setaip hari, sesuai dengan kebutuhan.

Rumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah merupakan entitas pelaporan karena merupakan bagian dari urusan kesehatan dan merupakan sub unit dari dinas kesehatan kota pekanbaru. Yang setiap tahun nya wajib mengkonsolidasi laporan keuangan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membawahi bidang kesehatan. pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki pendanaan yang merupakan bagian dari APBD;
 - b. merupakan entitas yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. dipimpin oleh pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi (dalam hal ini Dinas Kesehatan) yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah;
- dan

Selain sebagai entitas pelaporan, BLUD RSD Madani Kota Pekanbaru juga merupakan entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

4.3 Luaran dan Target Capaian

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini akan ditulis dalam bentuk laporan dan juga dalam bentuk publikasi ilmiah nasional.

Table 4.1 Luaran dan Target Capaian Kegiatan

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	
	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi	-	-	-
		Nasional terakreditasi	-	-	
		Nasional tidak terakreditasi	V		<i>Published</i>
	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional terindeks			
		Nasional			
	Invited Speaker dalam temuan ilmiah	Internasional terindeks			
		Nasional			

	Visiting Lecturer	Internasional			
	Hak kekayaan intelektual (HKI)	Paten			
		Paten sederhana			
		Hak cipta			
		Merk Dagang			
		Desain Produk Industri			
		Indikasi geografis			
		Perlindungan topografi sirkit terpadu			
	Teknologi Tepat Guna				
	Buku ajar / Modul			V	
	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				

BAB V

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana kegiatan tahapan berikutnya adalah mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis penatausahaan aset pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik itu di Rumah sakit daerah ataupun Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit daerah (RSD) Madani Berpedoman kepada PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Permendagri no 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), , PSAP no 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Laporan Keuangan BLUD RSD Madani di buat oleh kepala sub bagian keuangan dan staf Keuangan dengan latar belakang Pendidikan akuntansi, komputer dan tenaga Kesehatan lainnya.

6.2 Saran

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Harapan raya meminta rekomendasi kepada Badan kepegawaian sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru agar menambah staf di bagian keuangan yang berlatar belakang Akuntansi untuk dapat membantu pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Madani Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2013 *tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah*
- Hidayat, A.T, Pujiati, L, Hidyati, N, Hendrawan, S.A, Suprpto, S dan Nurali, N. 2018. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *COMVICE*, 2(1). 15-20
- Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. 2017. Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. *Comvice. Journal of Community Service*, 1(1), 33-38.
- Budi Mulyana¹, Akhmad Priharjanto², Andy P. Hamzah³. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015. *SEMBADHA 2018 (Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat)*

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ricardo, SE. M.Ak, AAP
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIK	-
5	NIDN	1008098502
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Payakumbuh, 8 September 1985
7	E-Mail	Ricardo@htp.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081374488806
9	Alamat Kantor	Jl. Mustafa Sari Pekanbaru
10	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Konsep Dasar Biostatistik 2. Manajemen Unit Kerja III 3. Perencanaan Anggaran

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau
Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi
Tahun Masuk – Lulus	2009 -2012	2015 -2017
Judul Skripsi/Tesis	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kabupaten/ Kota Propinsi Riau	Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dengan Pendekatan Soft System Methodology (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru)
Nama Pembimbing	- Zulbaridar, SE, M,Si - Al Azhar L, SE, M.Si	- Prof. Dr. Ria Nelly Sari, SE, MBA, Ak, CA - Dr. Vince Ratnawati

C. Riwayat Kursus / Pelatihan

Nama kegiatan	Jenis Kegiatan	Tempat, Tgl Kegiatan
Pekerti-Applied Approaci	Pelatihan	

(AA)		Pekanbaru, 14 s.d.17 Juli 2019
------	--	-----------------------------------

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2017	Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dengan Pendekatan Soft System Methodology (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru)	Pribadi	-
2	2020	Analisis Perencanaan Penbiayaan Kesehatan Penanganan Covid 19 Di Pemerintah Kota Pekanbaru yang bersumber dari Pemerintah	Hibah Stikes	3.000.000
3	2020	Analisis faktor Faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah Di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Pekanbaru	Hibah Dikti	16.780.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Dengan Pendekatan Soft System Methodology (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru)	https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/6048	2017

F. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jenis Organisasi	Lokasi
1	Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (IKAFE UA) periode 2018-2020	Organisasi Sosial/ alumni	Pekanbaru, Riau
2	Pengurus Ikatan Alumni Magister Akuntansi Unirversitas Riau periode 2020-2022	Organisasi Sosial/ alumni	Pekanbaru, Riau

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Pekanbaru, 5 oktober 2021

Pengusul



Ricardo, SE. M.Ak, AAP

Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Wen Via Trisna, SKM, M.K.M
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIK	-
5	NIDN	1023108605
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Koto Kecil, 23 Oktober 1986
7	E-Mail	rhinakhajol@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085375305998
9	Alamat Kantor	Jl. Mustafa Sari No 05 Pekanbaru
10	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Manajemen Rekam Medis 2. Terminologi Medis 3. KKPMT

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	STIKes Hang Tuah Pekanbaru	STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Bidang Ilmu	Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi)	Kesehatan Masyarakat (Administrasi Rumah Sakit)
Tahun Masuk - Lulus	2013 -2015	2015 -2017

Judul Skripsi/Tesis	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja Kota Pekanbaru Tahun 2015	Keakuratan Kode Tindakan Pada Dokumen Rekam Medis Menggunakan ICD-9 CM Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pelatihan Pengkodean Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2017
Nama Pembimbing	Suharmadji, SKM, M.Kes	1. Dr.dr Boy Subiroa Sabagarguna, MARS 2. Dr. Arnawilis, MARS

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2019	Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Di Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru Tahun 2019	Pribadi	

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

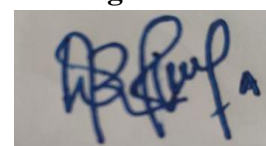
No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	Keakuratan Kode Tindakan Pada Dokumen Rekam Medis Menggunakan ICD-9 CM Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Pelatihan Pengkodean Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	INOHIM	Vol 6 No 1 (2018)
2	Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan <i>Informed Consent</i> di RSUD Bangkinang	Jurnal Kesehatan Komunitas	Vol 3 No 2 (2016)
3	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Kota Pekanbaru Tahun 2015	Jurnal Ilmu Kebidanan (<i>Journal Of Midwifery Science</i>)	Vol 5 No 01 (2016)

4	Pengaruh kompetensi <i>coder</i> terhadap keakuratan dan ketepatan pengkodean menggunakan icd-10 Di rumah sakit “X” Pekanbaru tahun 2016	Jurnal KESMARS	Volume 1 No 1 Januari-Juni 2018
5	Evaluation of Primary Care Application Users in the First Class Clinic in Pekanbaru District on Human, Organization and Technology Factors Using the EUCS Method	(ICCELST-SS 2019)	
6	Analisis Pengetahuan Petugas Rekam Medsi Tentang Terminologi Medis Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau	JMIKI	Volume 7 No 1 (2019)
7	Mapping of Patient Distribution in ICU Room of Regional General Hospital of Meranti Islands in 2018	Journal of Economic	Vol 6 No 1 (2019)
8	Hubungan motivasi <i>ekstrinsik</i> kinerja petugas kesehatan Terhadap ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis Rawat jalan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2018	Menara Ilmu	Vol 13 No 1 (2019)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

Pengusul



Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, M. K.M

Anggota 2

G. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fitriani Astika, SKM, M.K.M
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIK	-
5	NIDN	1012118803
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang , 12 November 1988
7	E-Mail	Fitrianiastika123@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085364921561
9	Alamat Kantor	Jl. Mustafa Sari No 05 Pekanbaru
10	Mata Kuliah Yang Diampu	4. Praktek Pengkodean 5. Analisis Perancangan SIK

H. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	STIKes Hang Tuah Pekanbaru	STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Bidang Ilmu	Administrasi Rumah Sakit	Kesehatan Masyarakat (Administrasi Rumah Sakit)
Tahun Masuk - Lulus	2013 -2015	2017 -2019
Judul Skripsi/Tesis	Analisis belum terlaksananya sistem komputerisasi TPPRJ Di Rsud Petala Bumi Tahun 2015	Penerapan <i>Elektronik Medical Record</i> di Rumah Sakit Tahun 2019
Nama Pembimbing	Desri Novita Yanti, SKM, M.Kes	3. Dr.dr Boy Subirosa Sabagarguna, MARS 4. Ahmad Satria Efendi, M.Kes

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	Penerapan Elektronik Medical Record di Rumah sakit X Pekanbaru Tahun 2020		2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

Pengusul



Fitriani Astika, A.Md.PK, SKM, M. K.M

Lampiran 2 Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1.	Ricardo, SE. M.Ak, AAP/1008098502	STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Rekam Medis	12 Minggu	Ketua (mengkoordinir dan melaksanakan pengabdian masyarakat)
2.	Wen Via Trisna A.Md PK SKM, M.KM	STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Rekam Medis	10 Minggu	Anggota (Melaksanakan Penelitian)

3.	Fitriani Astika, SKM, M.K.M	STIKes Hang Tuah Pekanbaru	Rekam Medis	10 Minggu	Anggota (Melaksanakan Penelitian)
----	--------------------------------	-------------------------------	----------------	--------------	---

Uraian tugas dirinci sebagai berikut :

Ketua

1. Mengkoordinir kegiatan studi pendahuluan dan suvei lapangan
2. Menyusun laporan
3. Melakukan seminar hasil

Anggota

1. Mengurus perizinan ke STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat

A. LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PENGABDIAN

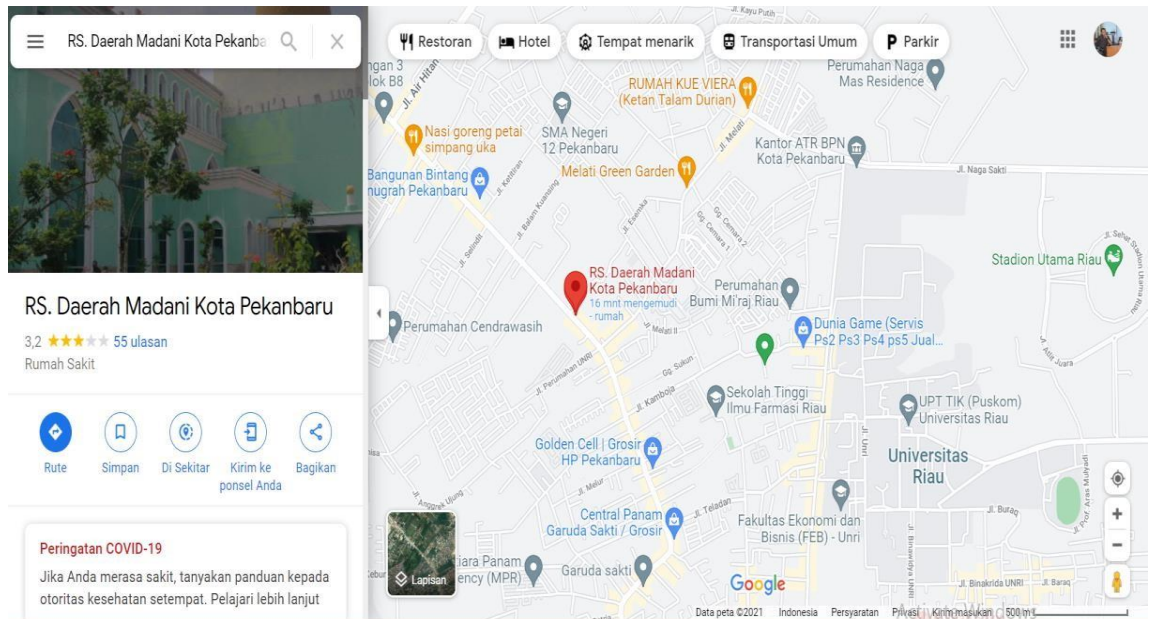
No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Jurnal	Rp 500.000,00
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK dan fotocopy	Rp 500.000,00
3	Modul/ Bahan Ajar 5 Rangkap @Rp.100.000	Rp 500.000,00
4	Penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan	Rp. 500.000,00
5	Administrasi dan surat menyurat	Rp. 250,000,00
6	Transportasi	Rp 250.000,00
7	Konsumsi	Rp 500.000,00
8	Dokumentasi	Rp 500.000,00
	Total	Rp 3.500.000,00

B. JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Rencana pelaksanaan pengabdian akan dilakukan dengan tahapan yang dapat dilihat pada table 5.2 berikut:

No	Uraian Kegiatan	Minggu Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tahap Persiapan, meliputi:												
	*Perizinan dengan lembaga terkait	■											
	*Penetapan Lokasi Penelitian		■										
	*Pertemuan dengan anggota dan pihak terkait			■									
	*Penentuan jadwal penelitian			■									
	*Penyusunan instrument penelitian				■								
2.	Tahap Pelaksanaan, meliputi:												
	*Penetapan <i>survey</i> lapangan					■							
	*Pengumpulan data					■	■						
	*Rekapitulasi dan pengolahan data						■	■					
	*Analisis data								■				
3.	Penulisan Laporan Akhir									■	■		
4.	Pengiriman Hasil dan Laporan Penelitian										■		
5.	Penyusunan Naskah Artikel Ilmiah											■	
6.	Publikasi Hasil pada Jurnal											■	■

Lampiran 3 Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Dokumentasi Kegiatan





Lampiran 4 Materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)



STRUKTUR ANGGARAN BLUD – PENDAPATAN BLUD



STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Berdasarkan Pasal 50 s.d 57 Permendagri 79/2018 terdapat 3 (tiga) bagian pos akun besar :

Pendapatan
BLUD

Belanja
BLUD

Pembiayaan
BLUD

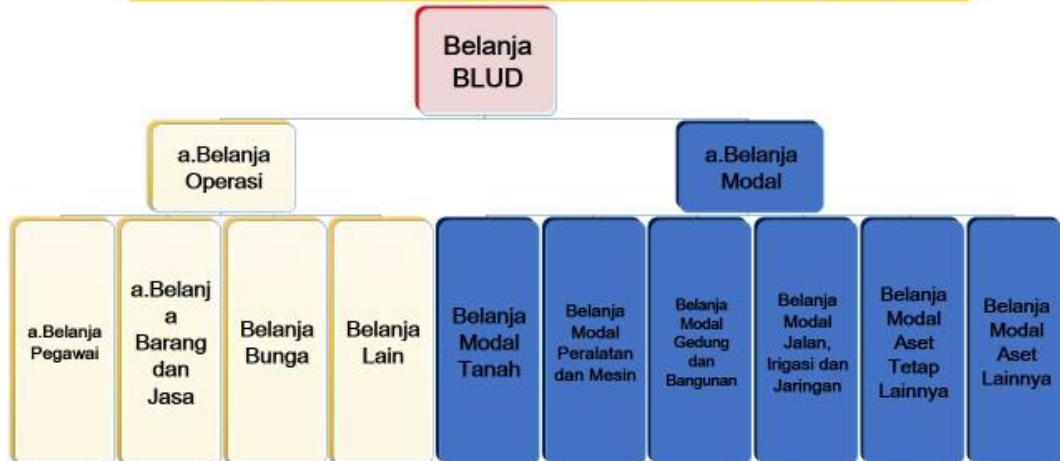
PENGANGGARAN PENDAPATAN BLUD PADA APBD



SUMBER PENDAPATAN BLUD



STRUKTUR ANGGARAN BLUD – BELANJA BLUD



PENGANGGARAN BELANJA BLUD PADA APBD

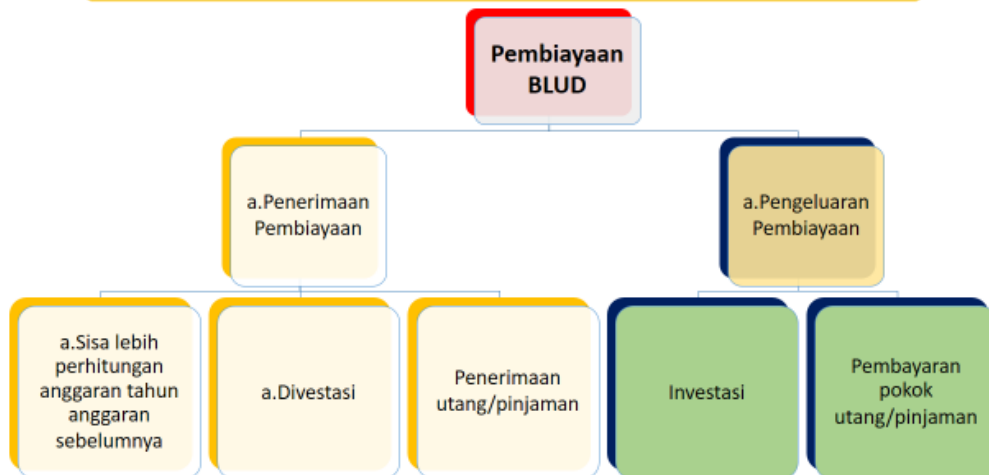


PENERIMAAN PEMBIAYAAN BLUD – SILPA TA SEBELUMNYA

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya adalah saldo kas BLUD baik dari dana BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD dan/atau rekening kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD baik yang ada di Bank maupun yang tunai.

Berdasarkan pasal 95 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan.

STRUKTUR ANGGARAN BLUD – PEMBIAYAAN BLUD



PENERIMAAN PEMBIAYAAN BLUD – SILPA TA SEBELUMNYA



Berdasarkan alur diatas, dijelaskan bahwa terdapat sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya yakni 20x1 senilai Rp100.000.000 dan 20x2 senilai Rp120.000.000. Nilai rata-rata silpa tahun 20x1 dan 20x2 sebesar Rp110.000.000 tersebut akan dianggarkan ke dalam RBA 20x4 pada pos akun SiLPA tahun sebelumnya. Proyeksi penganggaran SiLPA tahun sebelumnya tersebut dihitung berdasarkan rata-rata silpa tahun sebelumnya pada dua tahun anggaran sebelum tahun dilakukannya penyusunan RBA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN BLUD – INVESTASI & PELUNASAN PINJAMAN

Investasi adalah rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Pembayaran utang/pinjaman adalah rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam RBA yang dianggarkan adalah hanya pembayaran pokok utang/pinjaman jangka panjang meliputi pokok utang/pinjaman yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pembayaran pokok utang/pinjaman jangka pendek dapat dilakukan di perubahan anggaran, baik atas realisasi utang/pinjaman jangka pendek yang dilakukan sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN BLUD – DIVESTASI & PINJAMAN

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya adalah rencana penggunaan saldo kas BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD dan/atau rekening kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD, baik yang ada di Bank maupun yang tunai

Divestasi adalah rencana penarikan dana karena BLUD menarik investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

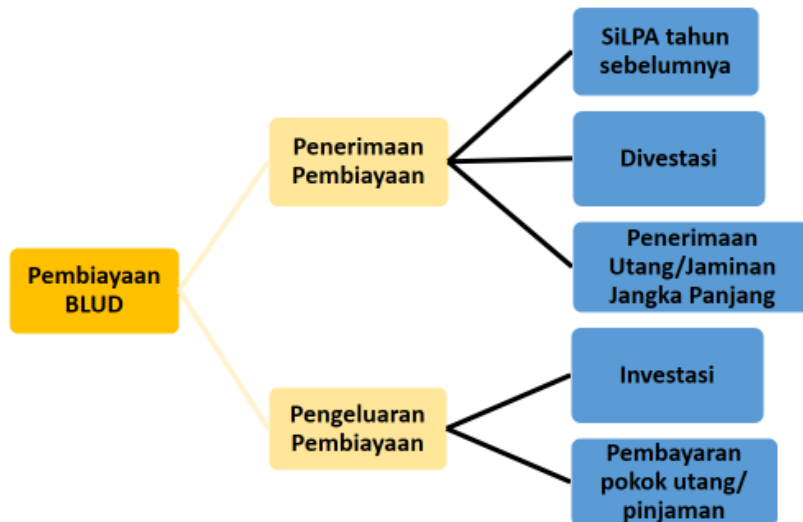
Penerimaan utang/pinjaman adalah rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam RBA yang dianggarkan adalah hanya utang/pinjaman jangka Panjang meliputi penerimaan pokok utang/pinjaman yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran penerimaan utang/pinjaman jangka pendek dapat dilakukan di perubahan anggaran, baik atas realisasi utang/pinjaman jangka pendek yang dilakukan sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

ILUSTRASI PENGANGGARAN UNTUK PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PANJANG



KOMPONEN PEMBIAYAAN BLUD



PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

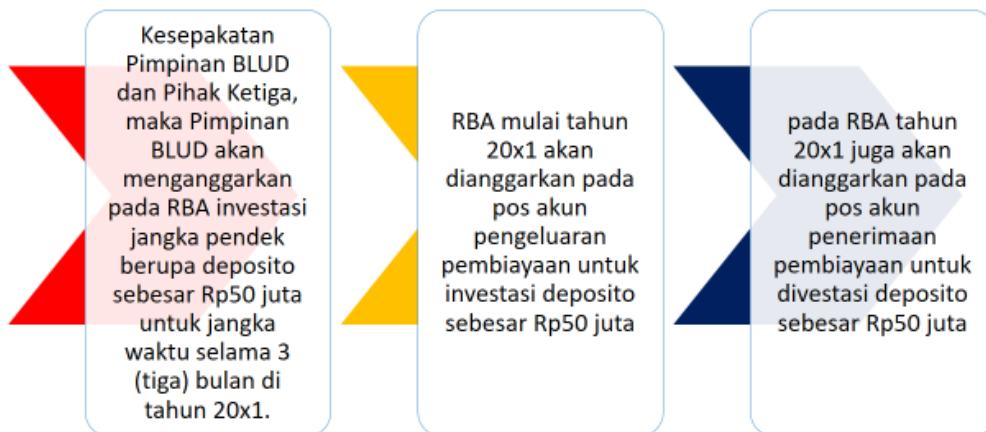
Pasal 58 s.d Pasal 64 Permendagri 79/2018 , menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya. RBA disusun berdasarkan :

• **Anggaran Berbasis Kinerja**, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

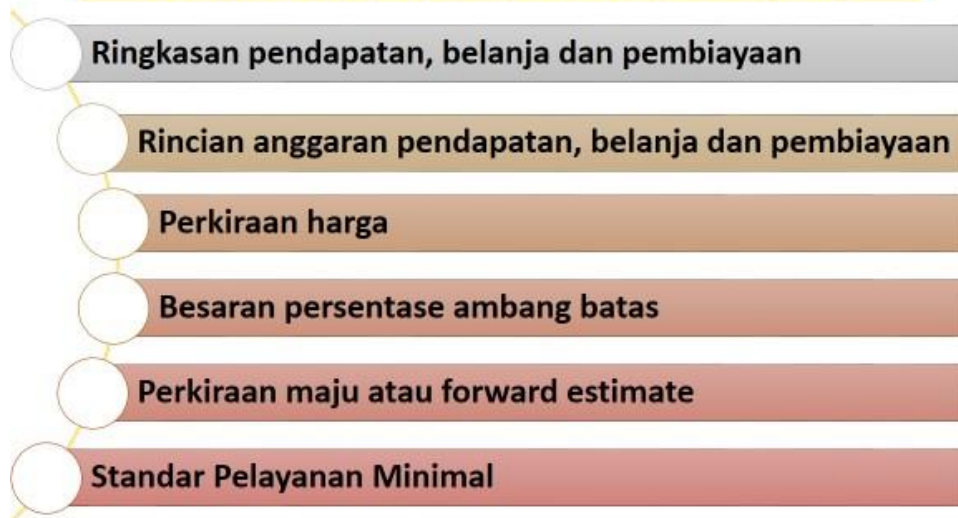
• **Standar Satuan Harga**, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan KDH

• **Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan** akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

ILUSTRASI PENGANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UNTUK POS AKUN DIVESTASI DAN INVESTASI



KOMPONEN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)



PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)



FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1...(4)	2...(5)	3...(6)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dit	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dit	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	dit	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a.	
	b.	
	c.	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)

	dit	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dit	
	Jumlah	

..... (7)
 Penanggung Jawab Badan Layanan Umum Daerah
 (M)
 (nama lengkap)
 MP

FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN BELANJA BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Sumber Dana					Jumlah (Rp)
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	SILPA	
1...(4)	2...(5)	3...(6)					4...(7)
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Barang dan Jasa						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Bunga						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Lain-lain						
	a.						
	b.						
	dit						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Peralatan dan Mesin						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Gedung dan Bangunan						
	a.						

FORMAT DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN BELANJA BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 ----- (2)
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Sumber Dana					Jumlah (Rp)
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SUPA	
1 ... (4)	2 ... (5)				3 ... (6)		4 ... (7)
	b.						
	dit						
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Aset Tetap Lainnya						
	a.						
	b.						
	dit						
	Belanja Aset Lainnya						
	a.						
	b.						
	dit						
	Jumlah						
Nilai Ambang Batas sebesar Rp. (8)					-----20.... (9) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (Mtd) (nama lengkap) NP		

FORMAT RBA BELANJA PER KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)(2) RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ... (3)					
Program	:(4)				
Kegiatan	:(5)				
Sub Kegiatan	:(6)				
Sumber Dana	:(7)				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja (8)		Target Kinerja (9)		
Capaian Program					
Maju/kun					
Keluaran					
Kelompok Sasaran Kegiatan : (10)					
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN					
KODE REKENING ... (11)	URAIAN ... (12)	RINCIAN PERHITUNGAN ... (13)			JUMLAH ... (14) (Rp)
		VOLUM	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) ... (15)					
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.... (16)	 30. (17) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (td) (nama lengkap) NIP.			

FORMAT RINGKASAN RBA (PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)(2) RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ... (3)		
No	uraian	Jumlah (Rp)
1. (4)	2. (5)	3. (6)
PENDAPATAN		
	Dana Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kelangkaan	
	APBD	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang lain	
	Jumlah	
BELANJA		
BELANJA OPERAS		
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bangun	
	Belanja Lain-lain	
	Jumlah	
BELANJA MODAL		
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Pipa, dan Jembatan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
SURPLUS/DEFISIT		
PEMBAYARAN		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)(2) RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ... (3)		
No	uraian	Jumlah (Rp)
1. (4)	2. (5)	3. (6)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
	Penghasilan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILA) Tahun Anggaran sebelumnya	
	Denda/di	
	Pembiayaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
PELOUTAK PEMBIAYAAN		
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Prinsipal	
	Jumlah	
	Pendapatan Netto	
	Sisa Lebih/Utang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SLU/SUK)	
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.... (7)	 30. (8) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (td) (nama lengkap) NIP.

